

## Dinamika Politik *Catch-all* atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten

Yeby Ma'asan Mayrudin<sup>1</sup>, Wahyu Kartiko Utami<sup>1</sup>, Peri Irawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Abstract.** This article examines the dynamics of catch-all politics regarding the existence of women in the organization of political parties, focusing on the Democratic Party and the Prosperous Justice Party (PKS) in the Banten region. The basic rationale for catch-all politics is to embrace all elements of society -including women- to become a unit for a political party. However, the strong influence of patriarchal culture means that the existence of women tends to be seen as merely a source of votes and fulfilling the 30% quota for women in the party organizational structure and the candidacy process at the legislative or “pen-caleg-an” level. The research method that we operate is a qualitative descriptive method in the style of Lambert et al with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The results of this research illustrate that the existence of women in the Democratic Party and PKS as party cadres and legislative candidates is fundamental. Then there is material and non-material support from both parties for women politicians to get involved in electoral political contestation. Furthermore, what is interesting is the process of the two parties in building catch-all politics that embraces women as politicians, eliminating the construction of patriarchy in the party organization.

**Keywords:** Women politicians; Catch-all politics; Political Parties; Democrat Party; PKS.

**Abstrak.** Tulisan ini membedah dinamika politik *catch-all* atas eksistensi perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik yang memfokuskan pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Banten. Nalar dasar politik *catch-all* ialah merangkul segenap elemen masyarakat -termasuk kaum perempuan- untuk menjadi kesatuan bagi sebuah partai politik. Namun gejala budaya patriarki yang melekat kuat membuat eksistensi kaum perempuan cenderung dilihat sekedar lumbung suara semata dan pemenuhan kuota 30% perempuan di kepengurusan partai dan proses kandidasi di level legislatif atau “pen-caleg-an”. Adapun metode penelitian yang kami operasionalkan ialah metode deskriptif kualitatif ala Lambert dkk. dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan kehadiran kaum perempuan di Partai Demokrat dan PKS sebagai kader partai dan kandidat calon anggota legislatif sangat fundamental. Kemudian adanya dukungan materiel dan non-materiel dari kedua partai tersebut kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik elektoral. Selanjutnya hal yang menarik ialah proses kedua partai tersebut dalam membangun politik *catch-all* yang merangkul kaum perempuan sebagai politisi mengeliminasi konstruksi patriarki di dalam pengorganisasian partai.

**Kata Kunci:** Politisi perempuan; Politik *Catch-all*; Partai Politik; Partai Demokrat; PKS.

Received: 17/08/2023

Revised: 23/09/2023

Accepted: 24/09/2023

---

**\*Korespondensi:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan  
Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang,  
Banten  
Email: yeby@untirta.ac.id

## PENDAHULUAN

**D**iskursus mengenai eksistensi perempuan dalam politik menjadi isu penting dan krusial, terlebih saat ini perempuan diberikan kesempatan besar dalam aktivitas perpolitikan (Hurriyah, 2019a; Panjaitan, 2014a; Talaohu, 2021). Di Indonesia sendiri hal demikian itu terwadahi dengan adanya kebijakan *affirmative action* 30% yang termaktub pada UU No. 2 Tahun 2008 dan peraturan lainnya. Akan tetapi aktivitas perempuan dalam politik di Indonesia dan juga di beberapa negara lain masih terhambat perwujudannya secara masif (Abdulkadir & Müller, 2020; Godjali & Mayrudin, 2020; Prager, 2020). Hal itu diindikasikan karena masih kuatnya anggapan bahwa eksistensi perempuan seolah “*dihadirkan tapi tidak diharapkan*” (Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022; Nurrohman, Mayrudin, Astuti, & Maharani, 2023)

Keterlibatan perempuan di ranah publik masih belum massif sehingga tantangan untuk mendorong eksistensi perempuan merupakan hal yang sangat diperlukan (Suciptaningsih, 2010; Muslimat, 2020). Salah satu tantangan besar atas eksistensi kaum Perempuan dalam politik ialah praktik budaya patriarki yang masih mewarnai kebiasaan masyarakat (Candra, 2019; Suriani, 2017; Tuhri, 2018). Budaya tersebut melanggengkan pandangan bahwa perempuan tidak harus seperti laki-laki, baik itu ikut serta maupun terlibat di dalamnya. Berbeda dengan pandangan masyarakat yang sudah melek terhadap peran perempuan yang semakin marak disuarakan oleh banyak gerakan perempuan.

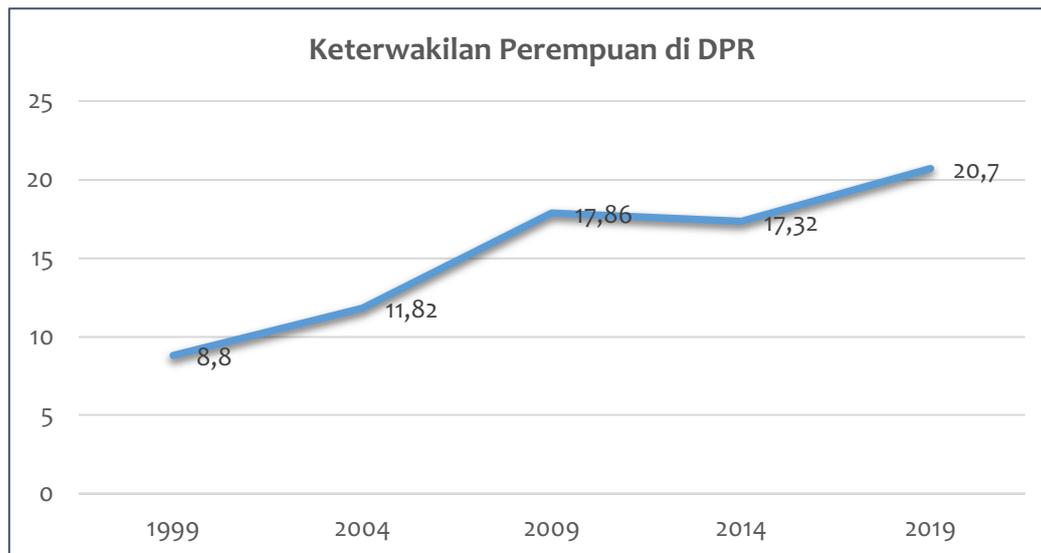
Keterwakilan atas partisipasi yang dilakukan oleh perempuan tidak semata-mata hanya untuk ikut serta saja, akan tetapi perempuan dalam hal ini sesungguhnya mampu berperan aktif dan juga terlibat dalam menentukan keputusan di ranah publik. Pada dasarnya untuk dapat mendukung kepentingan perempuan maka perempuan tersebut mampu berperan penting dan memperjuangkan kehadiran dalam menentukan setiap kebijakan atas jabatan yang dimilikinya. Kesadaran perempuan untuk kemudian terlibat di dalamnya sebuah keharusan yang tidak dapat kita pungkiri. Sehingga saat ini juga pemerintah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dan ikut serta dalam ranah publik. Melalui kuota 30% perempuan harus ikut andil di dalamnya untuk dapat menentukan kepentingan-kepentingan perempuan.

Perempuan memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan, sehingga hal itu menjadi landasan dasar yang seharusnya menjadi Kesadaran perempuan untuk ikut serta dalam politik praktis. Kebijakan kuota 30% tersebut memberikan sebuah ruang bagi perempuan

untuk ikut serta dalam kontestasi politik yang akan berdampak pada peranan signifikan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang tidak bias gender yang tidak bisa diwakili oleh laki-laki khususnya permasalahan terkait perempuan (Fata, 2014). Alokasi kuota 30% juga dapat memberi dampak konkrit bila didukung oleh langkah strategis dari partai politik untuk mendorong dan merekrut kader perempuan potensial untuk kemudian berkiprah pada politik praktis (Heryati, 2005). Pada sisi inilah, partai politik memainkan peran kunci dalam mempromosikan kadernya, khususnya kader perempuan sebagai politisi di dalam pengorganisasian partai politik (Hurriyah, 2019b; Panjaitan, 2014b; Wan Asrida, Wazni, 2016).

Namun berdasarkan fenomena empiris, keterwakilan perempuan di dalam tubuh partai-partai politik itu juga sesungguhnya masih terindikasi kekurangan kader perempuan. Di samping itu, kuantitas anggota parlemen baik di level lokal bahkan nasional masih belum banyak jumlahnya. Berdasarkan pada data *Inter Parliamentary Union*, memberi gambaran mengenai sejumlah menteri perempuan di pemerintahan dan menyajikan juga data anggota legislatif perempuan di parlemen. Atas dasar itu, Indonesia ditempatkan pada peringkat ke 92 dari total 190 negara berdasarkan jumlah anggota kabinet perempuan pada data terakhir 1 Januari 2023. Alhasil secara keseluruhan menyoyal gambaran mengenai *Women in Politics 2023*, Indonesia berada pada angka 20,7% dengan total keterwakilan perempuan sebanyak 6 orang.





**Gambar 2. Keterwakilan Perempuan di DPR RI dari 1999 sampai 2019**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Keterwakilan perempuan pada tahun 1999 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi yang mana berdasarkan persentase kuota yang telah disediakan keterwakilan perempuan masih tidak memenuhi kuota yang tersedia hingga saat ini. Adapun jumlah anggota DPR RI Perempuan berdasarkan partai politik dalam dua periode terakhir, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai dengan keterwakilan Perempuan yang masih minim. Masih kurangnya representasi perempuan dan keterlibatannya dalam politik praktis, akan berimbas pada sulitnya perjuangan memenuhi keadilan gender.

Bersandar pada paparan di atas, kami memperoleh inspirasi untuk berupaya menggambarkan dinamika laku politik partai-partai maupun elitnya dalam membangun politik *catch-all* berbasis *gender mainstreaming*. Dalam konteks ini *Politik Catch-all* kami maknai sebagai aktivitas politik pada partai-partai maupun elitnya dalam membangun ruang inklusif bagi siapa saja. Artinya kehadiran politisi perempuan di partai politik pun seyogyanya memiliki bagian penting dari logika politik *catch-all* tersebut.

Dalam rangka menyelidik secara mendalam dinamika politik *catch-all* di tubuh partai-partai politik kami memutuskan hanya memfokuskan pada dua partai yaitu PKS dan Partai Demokrat dengan lokus wilayah Banten. Kami beralasan bahwa PKS di wilayah Banten ini menarik dikaji karena sebagai partai Islam dengan corak khasnya belum menunjukkan keterwakilan yang memadai di tubuh partai dan keanggotaan legislatifnya. Sedangkan alasan kami memilih Partai Demokrat ialah hadirnya sosok perempuan bernama Iti Oktavia

Jayabaya yang menjadi pimpinan partai di wilayah Banten. Dengan kasus tersebut, ada interseksi beragam isu krusial seperti kepemimpinan dan representasi perempuan, budaya patriarki, dan pengorganisasian partai berperspektif gender yang menarik untuk ditelisik secara holistik.

### Literature Review

Dalam eksplorasi mengenai diskursus politik dan perempuan yang banyak ditemukan dalam berbagai belahan dunia. Kajian dalam perdebatan ini penulis kaji berdasarkan pada penjelajahan perdebatan antara topik yang dipilih yaitu mengenai politik dan perempuan yang telah dikaji oleh beberapa penulis. Sementara penelitian mengenai politik dan perempuan sangat berbeda dengan penulis bahas, seperti di belahan dunia yaitu Norwegia tentang representasi perempuan di badan legislatif nasional yang sangat variatif dan berbeda dengan di Indonesia.

Adapun perdebatan mengenai politik dan perempuan di negara belahan dunia lainnya berbeda dengan kondisi di Indonesia, seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Richard E. Matland yang menjelaskan besarnya representasi perempuan di Dail Irlandia (Matland, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam politik di Irlandia sangat baik dan mampu bersaing dalam status gender yang sering dipermasalahkan, contohnya seperti fenomena partai besar di Amerika Serikat dan Britania Raya yang belum berhasil dalam menempatkan anggota perempuan dalam legislatif (Studlar & Welch, 1991). Dalam fenomena empiris ini representasi perempuan dalam dunia politik terus menjadi perbincangan sampai saat ini (Gusmansyah, 2019; Nasip, 2017).

Perempuan dalam ranah partai politik kerap kali banyak dikaji oleh beberapa ahli, di dalamnya lebih dominan terhadap apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh perempuan dalam mewakili aspirasi rakyat. Jika dilihat pada realita yang ada, kuota 30% yang diberikan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memaksimalkan bahwa perempuan juga harus mampu terlibat di ranah pemerintah. Hal tersebut merupakan angin segar dalam merepresentasikan keterwakilan perempuan dalam politik, namun kuota 30% masih terdapat kader perempuan dalam politik masih rendah, contohnya dalam pencalonan anggota DPRD, terdapat partai politik yang kekurangan calon perempuan.

Jika dilihat bahwa masih 20% keterwakilan perempuan yang masih minim akan kesadaran bahwa keterlibatan perempuan sangat diperlukan (Wahyudi, 2018; Martini et

al., 2021). Dalam beberapa kajian lainnya yang menjelaskan bahwa saat ini kader perempuan yang terlibat dalam ranah partai politik tidak terlepas dari dorongan partai yang mewajibkan untuk perempuan terlibat (Permata, 2017; Sulastri, 2020; Pratiwi et al., 2022). Sehingga pada kenyataan yang ada bahwa perempuan disini hanya diposisikan sebagai pelengkap dan bukan sebagai pemanis atau pelengkap dan seharusnya mampu mengambil peran penting dalam kesempatan yang menjadi tolak ukur sebagai kader perempuan yang mampu ikut serta berperan aktif dalam partai politik.

Keterwakilan perempuan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari selalu menjadi perbincangan di kalangan publik (Setiawan, 2019). Perempuan selalu dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang memposisikan perempuan untuk ikut andil dalam berbagai situasi. Keterwakilan perempuan yang semakin mendorong aktivitas dan ruang gerak perempuan di ranah publik juga menjadi langkah baik untuk dapat menyetarakan peran perempuan dan laki-laki di ranah publik. Meskipun pada umumnya keterwakilan perempuan dapat dilihat baik perempuan yang terlibat sebagai anggota parlemen maupun sebagai anggota partai politik (Warjiyati, 2016). Kemampuan perempuan untuk dapat ikut serta dan andil di dalamnya sebagai langkah agar aspirasi perempuan mampu didengarkan dan juga direpresentasikan melalui perumusan kebijakan di ruang publik.

Berdasar literatur (Mayrudin et al., 2022) yang membahas lebih dalam mengenai perjuangan kaum perempuan untuk dapat menyetarakan gender. Berfokus pada tokoh-tokoh perempuan yang berjuang untuk keadilan gender, seperti dan beberapa nama lainnya yang sama-sama berfokus untuk memperjuangkan keadilan gender untuk dalam mendapatkan kebebasan terhadap kaum perempuan (Agrrippa & Astell, 1992). Dalam rangka memperjuangkan hak dan juga kebebasan atas gerak perempuan banyak para tokoh yang ikut serta dan terlibat untuk kemudian ikut andil di dalamnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran perempuan yang sangat dominan untuk tetap didorong agar mampu berpartisipasi dan ikut andil di dalamnya. Perkembangan feminisme juga mendorong keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di tubuh partai politik. Bahwa saat ini sudah banyak kaum perempuan yang ikut serta dan terlibat di ranah publik hal tersebut sebagai penyeimbang terlepas dari kuota perempuan yang diberikan oleh pemerintah 30% untuk dapat andil dan terlibat di ranah publik. Banyaknya asumsi yang menghambat gerak perempuan terlebih budaya patriarki yang membelenggu membuat

kaum perempuan tidak menyadari bahwa pentingnya perempuan untuk ikut serta dan terlibat langsung sangat membantu untuk dapat menyempurnakan hak perempuan.

Peluang keterwakilan perempuan 30% juga membuka dan memberikan ruang gerak kepada perempuan untuk ikut serta dalam perpolitikan melalui partai politik yang diinginkan. Hal tersebut sebagai langkah awal untuk dapat berkontribusi dan berperan aktif bahkan mampu terlibat untuk menyuarakan kepentingan perempuan di ranah publik melalui rumusan kebijakan. Hadirnya kader perempuan dalam tubuh partai politik membuat satu langkah besar untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah parlemen. Meskipun sedikit masyarakat yang terlibat dalam partai politik akan tetapi suatu pembeda jika di dalam tubuh partai politik lebih menyoroti gerak perempuan untuk menjadi penggerak dalam dunia perpolitikan. Keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan sebagai *branding* tersendiri bahwa partai politik mampu merepresentasikan peran perempuan dan memunculkan perempuan untuk berperan dan bersaing dalam proses perpolitikan.

## METODE PENELITIAN

Kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut kami pilih karena hendak menggambarkan sebuah fenomena tentang dinamika inklusivitas pengorganisasi partai politik terhadap politisi perempuan. Metode ini dipakai guna menghasilkan sebuah narasi komprehensif terkait dengan peristiwa yang dialami oleh politisi perempuan di wilayah Banten dan sejauh mana partai membangun politik *catch-all* berbasis keadilan gender.

Pengumpulan data dilakukan pada pemeriksaan laporan penelitian menggunakan *literature review*, pemberitaan di media massa, dan dokumen resmi partai serta wawancara mendalam (Mann et al., 2013). Adapun analisisnya mendasar pada data-data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada beberapa politisi Perempuan di Banten seperti Novianty (Politisi PKS: Caleg DPRD Kota Serang), Zayna Zanzani Putri Susilo (Politisi Partai Demokrat: Caleg DPRD Kota Serang), dan Neng Yayat Nurhayati (Politisi Partai Demokrat: Caleg DPR RI). Selanjutnya perolehan data dari sumber primer dan sekunder dilakukan proses klasifikasi yang kami sebut “*coding*” dalam rangka menyusun *puzzle* data yang belum terstruktur menjadi struktur, runut, dan sistematis.

Terakhir kami mengupayakan analisa holistik dengan cara menyusun *puzzle* data dengan perspektif teoritis dan empiris secara seksama dan cermat guna “*discovering the nature of the specific events*” yang menjadi kekhasan dari metode ini (Mann et al., 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktivisme Politisi Perempuan pada Partai-partai Politik di Wilayah Banten

Politisi perempuan merupakan individu atau sekumpulan individu berjenis kelamin perempuan yang aktif pada partai-partai politik (Nurrohman et al., 2023). Partai politik dalam tulisan ini memanfaatkan konsepsi yang diformulasikan oleh Yeby M. Mayrudin dkk (2022) yang menanamkan *value* feminisme dalam memaknai partai politik. Mereka memaknai partai politik sebagai “*kendaraan untuk mengupayakan perjuangan politik kaum perempuan dan kaum peduli gender mainstreaming agar mencapai kehidupan yang berkeadilan melalui kebijakan-kebijakan pro-perempuan*” (Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022).

Paparan di atas merupakan pondasi awal dalam menelusur fenomena objektif soal aktivisme politisi Perempuan pada partai-partai politik di Banten. Politisi Perempuan sesungguhnya memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan politisi laki-laki untuk dipilih dan memilih. Hal tersebut telah diakomodasi dalam Undang-undang 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia yang memayungi peraturan-peraturan lainnya. Eksistensi perempuan dalam partai politik terus mengalami fenomena menarik. Hal tersebut bisa dilihat dari partisipasi perempuan yang aktif dalam partai politik, seperti halnya di wilayah Banten partisipasi perempuan dalam partai politik cukup menarik dibahas. Beberapa politisi Perempuan menjadi Ketua Pengurus Partai di level Provinsi Banten seperti Iti Octavia Jayabaya (Ketua DPD Partai Demokrat) dan Ratu Tatu Chasanah (Ketua DPD Partai Golkar). Di samping itu, politisi Perempuan juga didaulat sebagai Ketua Pimpinan Partai di level Kab/kota di wilayah Banten, seperti Nuraeni (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang) dan Ida Rosida Lutfi (Ketua DPC PDIP Kab. Serang).

Meskipun demikian ada hal yang sangat disayangkan soal penurunan kuantitas jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Banten. Pada pemilu legislatif periode 2014, anggota DPRD Banten berjenis kelamin Perempuan berjumlah 18 orang. Sayangnya pada pemilu periode 2019 jumlahnya menurun dengan hanya menghasilkan 15 perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Banten. Berikut di bawah ini sajian

data soal proporsi jumlah anggota DPRD Provinsi Banten dan juga nama-nama anggota DPRD Provinsi Banten yang berasal dari kaum Perempuan:

**Tabel 1.**  
**Proporsi Jumlah Anggota Legislatif (Aleg) / DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Asal Partai dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024**

No	Partai Politik	Aleg Laki-laki	Aleg Perempuan	Total Anggota
1	GERINDRA	14	2	16
2	PDI-P	9	4	13
3	GOLKAR	10	1	11
4	PKS	8	3	11
5	DEMOKRAT	9	0	9
6	PKB	7	0	7
7	PPP	3	2	5
8	PAN	5	1	6
9	NASDEM	3	1	4
10	PSI	0	1	1
11	HANURA	1	0	1
12	BERKARYA	1	0	1
<b>Total Jumlah Aleg</b>		<b>70</b>	<b>15</b>	<b>85</b>

Sumber: <https://dprd-bantenprov.go.id/komposisi-anggota/>

**Tabel 2.**  
**Nama Anggota Legislatif (Aleg) Perempuan di DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Asal Partai Periode 2019-2024**

No	Nama Aleg Perempuan	Partai Politik	Jumlah
1	Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si.	PDIP	4
2	Indah Rusmiati, S.IP.	PDIP	
3	Sri Hartati, S.H.	PDIP	
4	Hj. Anita Indah Wati, SE	PDIP	
5	A. Cut Muthia Ahmad M	PKS	3
6	Dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani	PKS	
7	Nurul Wasiah, A.Md. Keb	PKS	
8	Dra. Encop Sophia, S.Ag., M.A.	GERINDRA	2
9	Hj. Tati Nurcahyana, S.E., M.Si.	GERINDRA	
10	Neng Siti Julaeha, S. Pd I, M. Pd.	PPP	2
11	Hj. Ida Ating, S.IP.	PPP	
12	Ria Mahdia Fitri, S.Sos.	NASDEM	1
13	Desy Yusandi, S.E.	GOLKAR	1
14	Hj. Ella Silvia, Sh., MH.	PAN	1
15	Maretta Dian Arthanti, S.Psi.	PSI	1

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis

Berdasarkan pada keterangan data di atas menunjukkan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sukses menghasilkan paling banyak anggota legislatif Perempuan di DPRD Banten sejumlah empat orang. Selanjutnya disusul PKS sebagai partai terbanyak kedua yang berhasil menempatkan sebanyak tiga politisi perempuan di DPRD Banten. Sedangkan Partai Gerindra dan PPP masing-masing berhasil menjadikan dua politisi Perempuan sebagai anggota DPRD Banten. Sementara Partai Nasdem, Golkar, PAN, dan PSI masing-masing satu politisi Perempuan menjadi anggota legislatif di Provinsi Banten.

Meskipun jumlah politisi Perempuan di arena legislatif masih minim, akan tetapi progresivitas eksistensi dan peran mereka semakin kuat dalam pengorganisasian partai politik. Hal demikian berlandaskan pada (Nurrohman et al., 2023) yang menyebut bahwa terdapat empat alasan politisi perempuan aktif di partai politik, yaitu: (1) reformasi sistem pengorganisasi partai; (2) aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan; (3) keberdayaan sebagai politisi perempuan; dan (4) memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Berikut ilustrasinya:



**Gambar 3. Empat Alasan Politisi Perempuan Aktif di Partai Politik**

Sumber: (Nurrohman et al., 2023)

Pertama, reformasi sistem pengorganisasi partai. Kaum perempuan sesungguhnya ingin turut berperan dalam merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik dengan menekan proses kebijakan publik yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Kedua, aktualisasi diri yang representatif kaum perempuan. Mereka ingin mengaktualisasikan diri mereka sebagai perempuan dalam tubuh partai politik. Mereka

menganggap dengan keterlibatan kader perempuan dalam partai politik mampu menyerap aspirasi kaum perempuan dan menyuarakannya dengan lebih jelas karena banyak permasalahan kaum perempuan yang hanya bisa lebih dipahami oleh perempuan itu sendiri. *Ketiga*, keberdayaan sebagai politisi perempuan. Mereka ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa terlibat aktif dalam politik secara praktis. Mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melakukan sesuatu dalam politik sama halnya ketika peran itu dijalankan oleh laki-laki. *Keempat*, memberi warna atas praktik politik dan urusan publik. Mereka beranggapan bahwa *mindset* dan keterampilan peran perempuan yang bisa lebih diberdayakan (Nurrohman et al., 2023).

Dalam wawancara langsung kepada beberapa informan ditegaskan kembali bahwa memang aktivisme politik politisi Perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki motivasi konstruktif. Hal itu dapat disimak dari ucapan politisi perempuan Partai Demokrat Banten Bernama Zayna Zanzani Putri Susilo, sebagai berikut:

*"...memang udah dari kelas tiga SD teteh itu ikut-ikutan... kampanye, ke pelosok-pelosok ke masyarakat, udah ikut-ikutan dari kecil jadi tau kaya gimana itu partai politik, dan juga ketika teteh tau itu tuh denger-denger kenapa jadi dewan itu penting, untuk dapat merepresentasikan masyarakat dan juga agar mampu mewakili masyarakat."*

Sama halnya dengan Noviyanti Politisi Perempuan DPC PKS Kota Serang yang aktif dan terjun dalam partai politik. Ia menjelaskan bahwa:

*"... jadi saya dalam hal ini tidak ingin hanya sekedar mengisi kekosongan saja terlebih Ketika saya dicalonkan, saya inginnya dicalonkan untuk menang bukan hanya pelengkap atau pemanis saja. Karena bagi saya PKS ini partai yang mampu memperjuangkan anggota yang akan maju. Sehingga Novy ingin terjun di dalamnya untuk dapat menyuarakan hak-hak Perempuan... Saya ikut gabung di PKS."*

Selain itu, perspektif lain yang juga menarik ialah paparan dari Neng Yayat Nurhayati yang merupakan Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Dia menjelaskan bahwa aktivitasnya di partai *"karena berbagai dorongan yang kami lihat baik softskill maupun kemampuan kerja. Nah itu tuh dilihat dari bagaimana kemudian kita mampu mengajak dan mampu terlibat untuk dapat menghidupkan partai politik."* Artinya keberdayaan politisi Perempuan di tubuh partai sudah memiliki nilainya tersendiri ditambah mereka juga mampu memberi warna khas atas setiap pengorganisasian partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia politik memiliki tujuan dan cita-cita yang besar, meskipun dilihat dari kuantitas dalam partai politik masih di dominasi oleh kader laki-laki. Namun dalam konteks ini, kami sama sekali tidak menyoal perbedaan jumlah kuantitas politisi laki-laki dan perempuan, namun bagaimana aktivitas perempuan dalam partai politik dan apa yang perankan politisi perempuan saat terjun dalam partai politik. Adapun tujuan kader perempuan terjun dalam dunia politik karena mereka menganggap bahwa aspirasi dan perjuangan perempuan itu mereka yang lebih memahami dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu diucapkan oleh Noviyanti dari kader PKS Kota Serang:

*“Didasarkan dari hati, untuk segala hal yang memang memiliki itikad, jadi saya lebih fokus ke muda bergerak berdampak dan bersinergi, sehingga kita generasi muda harus siap dan harus mampu melewati hal ini. Tadi itu, percaya diri harus dari hati, misalnya pasti aja nanti ada yang bilang itu siapa ya, jadi kita coba terjun berbagai organisasi dan berharap kepada generasi muda untuk melakukan perubahan. Bahwa keterwakilan perempuan itu sangat penting untuk dapat terlibat dan juga ikut serta untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, jadi saya ingin menampung dan menyuarakan aspirasi perempuan.”*

Politisi perempuan terjun dalam partai politik memiliki tujuan dan cita-cita, yaitu ingin menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif. Selain dari itu, secara umum perempuan menginginkan perubahan-perubahan. Atas dasar itu, menurut Noviyanti juga menekankan soal perempuan harusnya banyak berpikir untuk dapat bergerak dan bersinergi sesuai dengan keinginan untuk dapat mengangkat marwah kaum perempuan. Namun persoalan keterpilihan politisi Perempuan nyatanya masih terdapat begitu banyak tantangan dan hambatannya. Salah satu persoalan yang disorotinya ialah *“perempuan tidak memilih perempuan, yang mana seharusnya perempuan memilih perempuan.”* Bagaimana kemudian kaum perempuan dapat mewakili kepentingan-kepentingan dasarnya jika yang mengisi kursi legislatif ialah kaum laki-laki.

Selanjutnya keberdayaan mentalitas politisi perempuan diistilahkan oleh Politisi Muda Partai Demokrat yakni Zayna dengan slogan *“Wadon Wanten.”* Artinya perempuan berani, yang dimaksudnya ialah Perempuan harus berani dan tidak takut dalam memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dasar kaum perempuan. Memang penguatan pengarusutamaan gender dan keadilan gender di tengah masyarakat Banten khususnya dan segenap bangsa Indonesia umumnya perlu diejawantahkan secara lebih

serius. Alhasil kebijakan-kebijakan pro-perempuan seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, keluarga, kekerasan, lingkungan hidup, dan lainnya yang terkadang masih diabaikan dan tidak menjadi prioritas (Jovani, 2017; Wahyudi, 2019).

### Politik *Catch-all* Partai Demokrat dan PKS terhadap Politisi Perempuan

Pada bagian ini kami menyajikan gambaran mengenai dinamika politik *catch-all* berbasis *gender mainstreaming*. Artinya kami menelusur bagaimana aktivitas politik Partai Demokrat dan PKS dalam membangun ruang inklusif atas kehadiran politisi perempuan di tubuh partai-partai politik tersebut.

Setiap anggota partai politik memiliki tugas pokok dan fungsinya, keterlibatan kader dalam partai politik adalah salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik itu di eksekutif maupun legislatif. Penempatan politisi perempuan dalam struktur organisasi partai politik di Provinsi Banten tidak lagi dipengaruhi oleh aspek kultural patriarki melainkan lebih pada persoalan *background* kekuasaan dan kewenangan yang sedang dimiliki oleh politisi perempuan. Beberapa contohnya ialah Iti Octavia Jayabaya yang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten merupakan orang nomor 1 di salah satu wilayah di Banten yakni menjadi Bupati Lebak dua periode. Begitu juga dengan Nuraeni yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kota Serang Partai Demokrat. Ia terpilih dan dipilih menjadi pimpinan tertinggi di wilayah tersebut dikarenakan jabatannya sebagai anggota DPR RI. Atas dasar itu, logika politik *catch-all* Partai Demokrat lebih memosisikan politisi Perempuan sebagai aktor sentral dalam tubuh partainya dilihat dari kepemilikan kuasa dan kapasitas modal yang melekat pada politisi Perempuan tersebut. Artinya politisi Perempuan tidak selalu berstatus subordinat dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif patriarki (Suwastini, 2013).

Progresivitas laku politik *catch-all* lainnya yang menarik adalah soal kandidasi politisi Perempuan sebagai calon anggota legislatif. Hal demikian disampaikan langsung oleh Noviyanti, Politisi Perempuan asal PKS Kota Serang yang memaparkan sebagai berikut:

*“Tadi itu proses pencalonan dilakukan karena melihat saya juga kader dari PKS, jadi saya siap karena melihat peluang yang ada. Masa ia ada peluang kita lepaskan kan sayang. Secara ekonomi memang penting tapi kembali lagi bahwa di PKS itu mensupport siapapun yang ingin terlibat dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakannya.”*

Berlandaskan pada narasi-narasi di atas, penempatan politisi perempuan di Partai Demokrat dan PKS tidak lagi secara dominan dipengaruhi oleh nalar patriarki. Melainkan eksistensi dan aktivisme politisi perempuan memang terdorong atas aturan formal yang berlaku soal *affirmative action* alokasi minimal 30%. Alhasil peluang untuk kehadiran politisi Perempuan di tubuh partai-partai politik dan pencalonan politisi perempuan sebagai calon anggota legislatif sangat terbuka lebar. Hal demikian juga ditegaskan oleh politisi perempuan Partai Demokrat Banten, Zayna Zanzani Putri Susilo yang menegaskan bahwa adanya instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang diharuskan melibatkan kaum Perempuan dalam pengorganisasian partai tersebut. Berikut pernyataan Zayna: *“Nah amanatnya untuk kita, sesuai dari arahan Ketum Pak AHY bahwa perempuan harus dilibatkan.”* Di samping itu, keterbukaan partai lain seperti PKS juga dalam membangun politik *catch-all* berperspektif gender kiat terasa, berikut ungkapan yang disampaikan narasumber Noviyanti selaku Caleg DPRD asal PKS: *“Jadi emang bener-bener mentalnya yang harus dimaksimalkan. Kan kalo kuota mah ya udah 30% perempuan harus ikut serta dan terlibat dalam ranah partai politik.”*

Dukungan Partai Demokrat dan PKS di wilayah Banten terhadap proses pencalonan politisi Perempuan sebagai caleg tidak hanya berupa dukungan moril, melainkan juga adanya dukungan materi. Hal ini disampaikan oleh Zayna dalam wawancara mendalam yang menjelaskan bahwa: *“Keterwakilan anggota atau calon dari kader Demokrat, yang baru masuk ke PD, yakni... Bu Epih beliau hanya ibu rumah tangga saja, jadi perempuan tuh punya unik yang berbeda, tapi kalo soal urusan ekonomi kita juga harus memikirkan.”* Politisi Perempuan PKS Noviyanti juga menegaskan hal yang sama bahwa di PKS Kota Serang politisi Perempuan seperti dirinya memperoleh dukungan moril dan materil. Berikut ungkapannya:

*“Jadi di PKS itu yang tidak punya uang juga bisa mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat, tapi di PKS itu mencari yang siap dan bertanggungjawab, jika dilihat dari orang lain bahwa keluarga saya secara ekonomi masih dibilang ekonomi ke bawah ke bawah lagi bahkan di bawah lagi. Tapi PKS mampu memfasilitasi saya untuk bisa mencalonkan diri dari Partai PKS ini.*

Selanjutnya laku politik *catch-all* beroperasi juga dalam proses penguatan kapasitas politisi Perempuan dalam bentuk pelatihan kader. Dalam melaksanakan program kerja baik politisi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak

adanya kesenjangan dalam mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan lainnya dalam partai politik, jadi sama-sama saja dengan kader laki-laki. Contohnya di Partai Demokrat Banten adanya bimbingan teknis bagi seluruh calon anggota legislatif, dan lainnya tanpa adanya pengkhususan.

*"...Kader sebelumnya telah dilatih melalui bimteks atau bimbingan teknis terlebih dahulu untuk bisa atau tidak bisa, tapi dalam hal ini bukan hanya sekedar secara ekonomi ya, di mana ketika seseorang maju dan sudah pasti orang tersebut sudah tau kemampuannya dan sudah pasti tau konsekuensinya ya. Nah gimana-gimananya itulah kita pasti sudah punya kualifikasi bagaimana kemudian kita mampu untuk maju"*

*"Jadi kalo di Demokrat secara keseluruhan itu tuh memang bener-bener terstruktural bahwa perempuan tidak dianggap lemah kenapa seperti itu karena di PD juga kan Bu Iti juga kan perempuan... ya gak melihat bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan di sama ratakan tanpa adanya tindakan yang dikesampingkan sehingga harus profesional aja" (Wawancara dengan Zayna Zanzani Putri, Politisi Perempuan asal Partai Demokrat).*

Dalam pemberian pelatihan dan program-program partai politik tidak adanya kesenjangan baik politisi laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga ditandakan oleh Noviyanti Politisi PKS yang mengucapkan bahwa *"saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan tersebut dilakukan untuk pembekalan partai politik."* Tidak adanya kesenjangan memberikan tanda bahwa setiap partai memberikan pendidikan terhadap kader-kadernya tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Berbagai aturan dirancang demi memberikan ruang kebebasan bagi para politisi perempuan untuk membawa dan menyampaikan aspirasinya. Selain itu juga sebetulnya menggambarkan betapa urgennya isu perempuan dalam perpolitikan. Keterlibatan perempuan di ruang publik dan menjadikan partai politik sebagai wadahnya adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa tingkat keterwakilan perempuan akan berdampak positif. Kebijakan-kebijakan pengarusutamaan gender akan tersentuh bila memang sesungguhnya perempuan terlibat secara aktif dan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan (Fata, 2014).

## KESIMPULAN

Aktivisme politisi perempuan dalam partai politik sangat terbuka, dalam hal ini perempuan memiliki tempat khusus dalam pengorganisasian partai politik. Alasan perempuan aktif dalam partai politik dikarenakan aspirasi dan perjuangan perempuan itu mereka yang lebih memahami dibandingkan dengan laki-laki. Alhasil kehadiran kaum

perempuan di Partai Demokrat dan PKS sebagai kader partai dan kandidat calon anggota legislatif sangat fundamental. Karena tanpa eksistensi Perempuan dalam pengorganisasian partai, partai tersebut akan mengalami masalah administratif dan akan dilakukan peninjauan atas keikutsertaannya sebagai peserta pemilu. Kemudian dari beberapa penjelasan informan yang merupakan politisi Perempuan didapat fakta bahwa adanya dukungan materil dan non-material dari kedua partai tersebut kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik elektoral. Selanjutnya hal yang menarik ialah proses kedua partai tersebut dalam membangun politik *catch-all* yang merangkul kaum perempuan sebagai politisi mengeliminasi konstruksi patriarki di dalam pengorganisasian partai. Untuk pencalonan dalam partai politik sangat terbuka lebar di setiap partai politik, sehingga perempuan diberikan kesempatan untuk mengikuti kontestasi politik.

Dari hasil kajian ini tim penulis sesungguhnya memberikan tawaran perspektif atas konstruksi keadilan gender. *Pertama*, dimensi aktivisme politik Perempuan saat ini merupakan hal yang progresif dan diapresiasi bukan sebaliknya dieksklusi maupun didiskreditkan. *Kedua*, Partai Demokrat dan PKS membangun politik *catch-all* terhadap eksistensi politisi Perempuan didasari kebutuhan *affirmative action* dan fungsionalisasi politisi perempuan sebagai pemberi warna dalam pengorganisasian partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut mereduksi kebanyakan studi atas pertentangan eksistensi Perempuan dengan konstruksi patriarki. Justru hasil kajian ini mengeliminasi geliat budaya patriarki dalam penempatan politisi Perempuan sebagai kader partai dan calon anggota legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, R., & Müller, H. (2020). The Politics of Women Empowerment: Female Leaders in The Uae. *Hawwa*, 18(1), 8–30. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341368>
- Agrippa, C., & Astell, M. (1992). Note: Place of Publication For Works Printed Before 1800 Is London Unless Otherwise Stated. *Women, Texts, And Histories: 1575-1760*, 269.
- Candra, P. H. (2019). Kritik Feminisme Postkolonial Untuk Membongkar Kultur Patriarki Dalam Budaya Manggarai. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 107–116.
- Fata, A. K. (2014). Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik. *Jurnal Transformasi Administrasi*.

- Godjali, Moh. R., & Mayrudin, Y. M. (2020). Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat Dan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 6(1), 1–19.
- Heryati, E. (2005). Perempuan Di Parlemen. *Forum Ilmiah Indonusa*, 2(3), 20–26.
- Hurriyah. (2019a). *Partisipasi Tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan Dengan Partai Politik di Indonesia*. 2(1), 89.
- Hurriyah. (2019b). *Partisipasi Tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan Dengan Partai Politik di Indonesia*. 2(1), 89.
- Indriyani, I. A., Hikmawan, M. D., & Godjali, M. R. (2018). Pengarusutamaan Gender Melalui Partisipasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
- Mann, T., Lamberts, R. P., & Lambert, M. I. (2013). Methods Of Prescribing Relative Exercise Intensity: Physiological and Practical Considerations. *Sports Medicine*, 43, 613–625.
- Matland, R. E. (1993). Kelembagaan Variabel Yang Mempengaruhi Representasi Perempuan Di Badan Legislatif Nasional: Kasus Norwegia. *Jurnal Politik*, Vol. 55, N, 737–755.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan Pada Pengorganisasian Partai-Partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3).
- Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(02), 131–143.
- Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan Dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi Pada Politisi Perempuan Di Banten. *Journal Of Political Issues*, 4(2), 137–151. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81>
- Panjaitan, M. E. F. (2014a). *Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative*.
- Panjaitan, M. E. F. (2014b). *Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Affirmative*.
- Prager, L. (2020). Emirati Women Leaders In the Cultural Sector: From “State Feminism” To Empowerment? *Hawwa*, 18(1), 51–74. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341370>
- Shaya, N., & Abu Khait, R. (2017). Feminizing Leadership in The Middle East: Emirati Women Empowerment and Leadership Style. *Gender In Management*, 32(8), 590–608. <https://doi.org/10.1108/Gm-07-2016-0143>
- Studlar, D. T., & Welch, S. (1991). Does District Magnitude Matter? Women Candidates In London Local Elections. *Western Political Quarterly*, 44(2), 457–466.

- Suciptaningsih, O. A. (2010). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Komunitas*, 2(2).
- Supriyadi, T., Julia, J., & Firdaus, E. (2019). The Problems of Gender Equality: A Reconstruction of Islamic Doctrine. *Journal Of Social Studies Education Research*, 10(2), 91–110.
- Talaohu, A. R. (2021). Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *Besterkunde*.
- Timur, M. K. L., & Suriani, I. (2017). *Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan*.
- Tuhri, M. (2018). Matrilineal Dan Bundo Kanduang: Tantangan Perempuan Minangkabau Dalam Menjaga Tradisi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Yang Multikultural. *Otoritas Keagamaan, Politik Dan Budaya Masyarakat Muslim*, 219.
- Wan Asrida, Wazni, C. P. D. (2016). *Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan*. 1–23.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 1–27.